

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR DI SMP NEGERI 144
JAKARTA**

Oleh:

Annisa Aghnia Rahim, Margaretha Suryaningsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang SemarangKotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Tingginya angka kemiskinan yang ada di Jakarta menyebakan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan. Faktor ekonomi membuat pendidikan menjadi kurang di prioritaskan. Alasan tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat bantuan biaya oprasional pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar.

Diantara banyaknya penerima bantuan kartu Jakarta Pintar, kenyataannya dilapangan masih banyak target KJP yang tidak sesuai. Masalah lainnya yaitu pemberian kuota penerima KJP yang dibatasi sehingga menyebabkan masih banyaknya siswa miskin yang kesulitan untuk memenuhi keperluan bersekolahnya terutama di SMP Negeri 144 yang dimana masih banyak siswa tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan KJP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kartu Jakarta Pintar di SMP 144 Jakarta sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan dengan efektif. Masih adanya kekurangan yang ditemui seperti kuota penerima yang terbatas yang menyebabkan masih banyaknya siswa yang tidak bisa menerima bantuan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Jakarta Pintar, Sekolah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain melalui pengajaran, pelatihan ataupun penelitian sehingga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap insan manusia pasti mendapatkan ilmu baik secara informal melalui keluarga, lingkungan, ataupun pergaulan serta secara formal melalui bangku pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan, minimnya sarana maupun prasarana yang diberikan serta kurang meratanya pembangunan dibidang pendidikan merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang maju serta berintelektual. Mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menjadikan banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin yang memilih untuk tidak bersekolah dan memutuskan untuk bekerja. Walaupun biaya pendidikan saat ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh orang tua siswa, namun biaya yang dikeluarkan masih cukup membebani terutama bagi masyarakat miskin.

Dalam upaya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat bersekolah maka pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan kartu yang diberikan kepada siswa/siswi untuk bantuan pendidikan melalui kartu yang berbentuk seperti ATM. Bantuan yang diberikan perbulan sebesar Rp 375.000 untuk siswa SMA/MA/SMALB kurang mampu, Rp. 390.000 untuk siswa SMKN, Rp 260.000 untuk siswa SMP/MTs, dan Rp 210.000 untuk siswa SD/MI kurang mampu.

Awal mulanya gagasan mengenai program Kartu Jakarta Pintar dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengatur serta meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk memperbaiki pembangunan dibidang pendidikan secara terus-menerus sebagai tuntutan besarnya tingkat populasi penduduk yang sebagian dari populasi tersebut adalah masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu tersebut untuk dapat bersekolah dan memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu untuk bersekolah.

Siswa miskin penerima KJP yaitu siswa atau siswi yang bersekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas baik secara materi ataupun penghasilan orangtua yang untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya, seperti seragam, sepatu, tas sekolah, transportasi, makanan serta biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Maka diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah daerah melalui KJP dapat membantu para siswa miskin atau siswa yang tidak mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya.

KJP hanya diperuntukan bagi peserta didik warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu. KJP adalah bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik seperti: seragam sekolah, sepatu, buku, alat tulis, transportasi, ekstra kulikuler dan tambahan gizi. Sasaran pemberian KJP tidak berlaku bagi siswa yang terdaftar kurang mampu tetapi memiliki telpon genggam agar KJP dapat tepat sasaran dan penerima dari KJP merupakan benar-benar siswa yang membutuhkan. Seleksi serta verifikasi ketat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembuatan KJP agar target peserta dari KJP tepat sasaran. Penjaminan KJP dapat digunakan secara tepat sesuai peruntukannya, yakni menutup biaya personal masing-masing peserta didik

dilakukan oleh pemerintah daerah dibantu oleh sekolah-sekolah sebagai pengawas berjalannya KJP agar sesuai dengan ketentuan.

Diantara banyaknya penerima bantuan kartu Jakarta Pintar, kenyataannya dilapangan di SMP Negeri 144 Jakarta bahwa masih banyak target KJP yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Banyak dari penerima KJP yang mengaku belum menerima, tetapi namanya mereka sudah muncul didalam daftar penerima KJP. Masalah lainnya yaitu pemberian kuota penerima KJP disetiap sekolah sama, sedangkan tidak semua sekolah memiliki jumlah siswa miskin yang sama dan ini menyebabkan masih banyaknya siswa miskin yang kesulitan untuk memenuhi keperluan bersekolahnya terutama di SMP Negeri 144 yang dimana masih banyak siswa tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan KJP.

Banyaknya minat di sekolah SMP 144 Jakarta untuk mendapatkan KJP tetapi kuota penerima KJP minim. Masih banyaknya siswa yang tidak mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkan KJP karena beberapa faktor yaitu terlambat memberikan persyaratan, administrasi yang rumit, kurangnya komunikasi antara murid dengan orangtua dalam pemberian

informasi mengenai KJP dan juga tidak lolosnya murid calon peserta penerima KJP pada seleksi dinas.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta sudah berjalan efektif.

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Peter deLeon dan Linda deLeon (dalam Nugroho, 2001: 486) mengatakan bahwa pendekatan pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*top-downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pada

saat yang sama, muncul pendekatan *bottom-upper*. Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin (dalam Nugroho, 2001: 486), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.

Dikemukakan deLeon dan deLeon (dalam Nugroho, 2001: 487) bahwa pendekatan Matland mempunyai keunggulan sehingga setiap kebijakan perlu diimplementasikan dan bahkan dipertanggungjawabkan dalam konteks tingkat ambiguitas dan tingkat konfliknya. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.

3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

D. FENOMENA PENELITIAN

1. Implementasi pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di SMP 144 Jakarta

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi Kartu Jakarta Pintar di SMP 144 Jakarta, digunakan tipe kriteria implementasi menurut deLeon dan Deleon yaitu karakteristik dari agen pelaksana/ implementor dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

- 1) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.

Kinerja implementasi kebijakan publik dalam hal ini adalah implementasi KJP akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri dengan agen pelaksananya. Implementasi KJP harus memiliki karakteristik yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Karakteristik implementor yang penulis amati seperti berikut:

- a) Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yaitu Gubernur DKI Jakarta memiliki sikap disiplin serta tegas

mempengaruhi sistem pemerintahan DKI Jakarta saat ini. Karakteristik yang kuat dalam memajukan kesejahteraan bangsa ini memiliki andil dalam pelaksanaan KJP.

- b) Pengawasan serta evaluasi yang terus dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan KJP agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perbaikan KJP dilakukan agar dapat berjalan jauh lebih baik lagi seperti sistem debit yang telah diberlakukan, kemudian juga naiknya dana bantuan yang akan diberikan.
- 2) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan dalam hal ini adalah kesuksesan tujuan KJP. Lingkungan eksternal juga merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan KJP, karena apabila lingkungan eksternal tersebut tidak kondusif maka dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Beberapa kondisi dan faktor yang mempengaruhi KJP yaitu:

- a) Faktor ekonomi yaitu sumber dana maka kebijakan sulit untuk dilakukan, maka pemerintah DKI

- mengeluarkan dana melalui APBD untuk melaksanakan program KJP.
- b) Kemudian faktor sosial, kondisi sosial masyarakat DKI Jakarta yang sebagian tidak mampu untuk membiayai kehidupan pendidikan maka pemerintah daerah mengeluarkan KJP sebagai salah satu cara agar setiap warga masyarakatnya mendapatkan pendidikan.
- c) Kondisi politik kadang sulit berlangsung karena setiap golongan memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi mereka memiliki keselarasan tujuan yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat dimana dalam kasus ini adalah pendidikan sehingga kondisi politik tersebut mendukung dengan kebijakan tersebut.
2. Efektifitas implementasi Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta
- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

Komunikasi antar organisasi dalam fenomena ini yaitu komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, dan juga penerima bantuan KJP. Komunikasi yang dilakukan agar aktor-aktor pelaksana implementasi tersebut

mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran harus disosialisasikan kepada sasaran atau penerima bantuan KJP agar dapat mengurangi penyimpangan implemetasi.

Beberapa kegiatan komunikasi yang penulis amati yaitu:

- a) Antara Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait dan sekolah yaitu informasi mengenai KJP.
 - b) Komunikasi antara sekolah dan siswa serta orangtua penerima bantuan yaitu sosialisasi KJP yang diberikan, pengarahan mengenai KJP tersebut.
 - c) Data penerima dan laporan penggunaan dana bantuan diberikan oleh sekolah kepada dinas terkait, pengawasan penggunaan dana bantuan yang dilakukan kedua belah pihak (dinas terkait dan sekolah).
- 2) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Disposition para pelaksana ataupun implementor harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan KJP. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor akan menjalankan kebijakan KJP sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Apabila pelaksana/implementor memiliki sikap yang bertentangan dengan membuat kebijakan maka proses implementasi KJP akan berjalan dengan tidak efektif. Maka diharapkan pelaksana atau implemetor KJP memiliki disposisi positif terhadap pelaksanaan KJP.

Persepsi dan sikap pelaksana kebijakan KJP di Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan tersebut yaitu menjalankannya dengan profesional sehingga segala sesuatu yang dilakukan dan dibutuhkan dalam menjalankan KJP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditentukan.

Beberapa hal mengenai kecenderungan atau disposisi dari pelaksana/ implementor yang penulis amati yaitu sebagai berikut:

- a) Komitmen yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait dan juga sekolah dalam menjalankan kebijakan KJP
- b) Profesionalitas yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait dan juga sekolah dalam menjalankan kebijakan KJP

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Karna

dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan memaparkan secara lebih mendalam tentang Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta dengan cara menggambarkan bagaimana implementasi yang ada di lapangan dan juga apakah sudah berjalan dengan efektif

Subyek penelitian mengambil informasi dari Wakil Kepala Sekolah, Guru BK dan Wali Kelas di SMP 144 Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Timur, Siswa dan Orang tua Siswa penerima KJP.

Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial. Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasilnya terhadap penelitian mengenai Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta.

PEMBAHASAN

A. Implementasi KJP

Kebijakan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun secara adil dan merata bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu guna membantu mereka

agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik demi meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Implementasi kebijakan KJP di SMP Negeri 144 sudah berjalan dengan banyaknya peminat karena banyak dari siswa yang bersekolah di SMP Negeri 144 Jakarta dari keluarga kurang mampu yang mayoritas pekerjaan orangtuanya yang tidak tetap dan memiliki tingkat pendidikan yang dimiliki rendah. Tetapi, peneliti melihat bahwa masih banyaknya siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP 144 Jakarta yang tidak menerima bantuan KJP. Hal ini disebabkan karena adanya penyaringan dari data yang dibawa oleh pihak ke sekolah kepada pihak dinas pendidikan yang akhirnya diseleksi menurut kewenangan dinas pendidikan.

Monitoring serta evaluasi Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta sudah baik. Seperti diketahui bahwa monitoring memiliki 3 tujuan dimana harus dilakukan untuk menjaga agar kebijakan dimana dalam permasalahan ini mengenai Kartu Jakarta Pintar dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan, kemudian agar bisa menemukan kesalahan sedini mungkin dan juga melakukan tindakan modifikasi apabila diharuskan. Ketiga tujuan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Daerah DKI Jakarta dimana kebijakan mengenai KJP

ini sudah dilakukan monitoring ataupun pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi bisa dilakukan oleh masyarakat apabila melihat kecurangan atau pelanggaran bantuan pendidikan ini. Kemudian dengan monitoring ini bisa ditemukan kesalahan seperti penggunaan KJP yang bisa digunakan atau diambil secara tunai yang banyak disalahgunakan untuk hal-hal diluar ketentuan KJP yang setelah itu dievaluasi dan berganti menjadi sistem debit dimana dengan bergantinya tunai menjadi debit, monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan modifikasi terhadap kebijakan agar tidak terjadi lagi kecurangan atau pelanggaran.

Dana APBD yang diberikan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini karena bantuan yang diberikan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari tahun ke tahun dana APBD ini selalu bertambah dilihat dari bantuan yang diterima oleh peserta yang juga bertambah. Penyerapan dana APBD untuk KJP ini juga sudah terserap dengan maksimal dan dipergunakan dengan baik. Kemudian dengan terbukanya pengelolaan tak hanya mengenai anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta ini yang dapat dipantau penggunannya oleh masyarakat luas, penggunaan bantuan KJP juga harus

dilakukan pertanggungjawaban sehingga dana yang dikelurkan tidak sia-sia.

Tujuan serta sasaran dari KJP dan juga mengenai keefektifan tentang pencapaian tujuan yang sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataan dilapangan dan hasil wawancara yang peneliti temukan mengenai keefektifan implementasi KJP di SMP 144 Jakarta, yaitu KJP sudah cukup baik tetapi belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya siswa atau peserta didik yang kurang mampu yang masih belum mendapatkan KJP karena proses penyaringan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Maka dari itu keefektifan implementasi KJP belum sepenuhnya terwujud karena tujuan dan sasaran yang diinginkan dari KJP belum sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi politik merupakan salah satu faktor pendukung berjalannya suatu pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan dilapangan yang ditemukan oleh peneliti mengenai kondisi politik sebagai salah satu faktor pendukung berjalannya kebijakan KJP ini yaitu mendukung kebijakan ini.

B. Efektifitas KJP

Efektifitas kebijakan KJP di SMP Negeri 144 Jakarta sendiri di lapangan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari antusias dari sekolah dan juga siswa untuk

menngikuti jalannya KJP. Usaha yang dilakukan sekolah baik guru dan juga pihak Tata Usaha di sekolah agar KJP bisa berjalan dengan efektif, salah satu contohnya dengan membantu para siswa yang kesulitan dalam membuat persyaratan sudah dilakukan sejak awal KJP tersebut diimplementasikan. Kemudian terlihat juga dari minat dan juga antusias dari para murid yang sebagian besar mendaftarkan dirinya sebagai peserta bantuan KJP.

Dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada sekolah yang merupakan instrumen komunikasi yang dapat menyampaikan apa yang diinginkan kepada target sasaran yaitu peserta didik melalui website KJP (www.kjp.jakarta.go.id) yang awalnya dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu memanggil Kepala Sekolah untuk menjelaskan mengenai KJP yang sekarang dan seterusnya komunikasi yang dilakukan yaitu dengan melalui website.

Alat sosialisasi atau pengenalan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan ini selain papan pengumuman dan juga internet dan/atau media cetak, salah satu yang terpentingnya adalah sekolah yang lebih dekat dan mudah menjangkau target sasarannya yaitu peserta didik dari keluarga yang kurang mampu yang merupakan sasaran KJP. Sekolah sudah melakukan sosialisasi dengan cara

menyampaikan informasi yang didapat kemudian disampaikan kepada target sasaran yaitu para peserta atau calon peserta penerima bantuan. Dengan terwujudnya sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah ini, maka program KJP dapat terimplementasikan kepada para peserta didik sehingga sasaran yang diinginkan bisa atau dapat terwujud.

Pengawasan dana untuk KJP yang dilakukan sekolah yaitu sekolah tidak dapat bertindak terlalu banyak karena sekolah tidak mempunyai peran yang terlalu banyak, tetapi sekolah mempunyai satu kewenangan terkait pengawasan yaitu apabila murid atau peserta didik penerima KJP melanggar tata tertib baik didalam sekolah ataupun diluar sekolah maka sekolah berhak mencoret nama peserta didik tersebut agar tidak bisa mendapat bantuan KJP. Para peserta bantuan KJP, juga harus membuat laporan penggunaan dana tersebut untuk menjadi pertanggungjawaban penggunaan.

Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi atau *stakeholder* sudah baik dan terus berusaha dengan maksimal agar KJP dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara terus melakukan pengawasan di lapangan dan juga terus berinovasi agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminilaisir

seperti contoh dalam pelaksanaan KJP yang sekarang sudah tidak dapat menarik uang tunai karena sekarang sudah memakai sistem debit, hal ini dilakukan karena banyaknya kecurangan yang dilakukan sehingga dari hasil pengawasan kemudian mengevaluasi hasil tersebut maka sekarang hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. Maka dari itu pengawasan atau monitoring yang dilakukan sangat penting agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Komitmen yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dan juga sekolah yang mendorong kebijakan KJP ini agar dapat berjalan. Dalam pelaksanaannya mengenai komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga sekolah sudah baik. Dari pemerintah daerah sendiri sudah menjalankan kebijakan ini dengan komitmen untuk dapat mencapai maksud dan tujuan dari KJP sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian untuk sekolah mengenai komitmen sudah dilakukan sejak awal seleksi penerima KJP sampai sekarang terlihat dari bagaimana sekolah berupaya dengan memudahkan siswa calon penerima ataupun penerima untuk mendapatkan KJP baik dari informasi,

syarat-syarat pengajuan dan lain sebagainya.

Profesionalitas implementor dalam menjalankan kebijakan KJP ini terlihat baik mulai dari pihak sekolah sampai dengan dinas pendidikan atau pemerintah daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ini yaitu dari kuatnya karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Pemimpin Provinsi DKI Jakarta. Profesionalitas yang nampak di sekolah yaitu kesadaran dari sekolah untuk mengerjakan tugasnya dengan optimal, profesional, dan juga adil dalam menjalankan tugas dan membantu siswa yang kesulitan dalam urusan KJP. Kemudian untuk dinas atau pemerintah daerah sendiri bekerja dengan sebaik mungkin agar KJP bisa berjalan dengan baik dan maksimal dengan mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya masing-masing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini dikarenakan siswa didik di SMP Negeri 144 Jakarta

sudah mendapatkan dan merasakan bantuan yang diberikan dan digunakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hal lain yang peneliti temukan dalam proses implementasi kebijakan KJP di SMP Negeri 144 Jakarta yaitu banyaknya peminat, tetapi terbatasnya kuota yang dimiliki sehingga masih banyaknya peserta didik dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa mendapatkan bantuan ini.

Hasil penelitian mengenai efektifitas Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta dapat disimpulkan bahwa kebijakan KJP sudah berjalan dengan efektif terlihat dari para peserta didik yang sudah menerima dana bantuan tersebut. Sekolah juga menjadi pihak yang aktif dalam membantu siswanya untuk bisa mendapatkan bantuan KJP. Banyaknya minat dari siswa yang berada di SMP Negeri 144 Jakarta ini dan juga antusias yang tinggi dinilai sebagai salah satu contoh bahwa kebijakan ini sudah berjalan dengan efektif.

Efektifitas ini tidak jauh dari bagaimana komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik dari pemerintah daerah, pihak sekolah, maupun siswa serta orang tua siswa. Penyampaian informasi dari semua pihak yang berkaitan ini sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Implementasi KJP di SMP 144 Negeri Jakarta sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyaknya siswa yang sebenarnya masuk ke dalam kriteria penerima bantuan yang tidak mendapatkan KJP karena kuota yang terbatas. Hal ini sangat disayangkan karena siswa tersebut juga berhak untuk mendapatkan KJP. Saran yang dapat penulis berikan mengenai ini yaitu diharapkan pemerintah tak hanya menambahkan dana bantuan saja tetapi harus juga memperhatikan quantity atau jumlah yang seharusnya mendapatkan bantuan KJP

Monitoring yang dilakukan juga harus menyeluruh tak hanya mengenai pertanggungjawaban dana bantuan, serta tepat sasarnya penggunaan tetapi juga harus dilihat dari sisi jumlah kuota yang sesungguhnya masih banyak yang harusnya bisa mendapatkan tetapi terbatas karena kuota yang sudah penuh.

Efektifitas implementasi KJP di SMP Negeri 144 Jakarta sudah berjalan dengan baik. Terbukanya pihak sekolah terhadap siswa yang menerima bantuan KJP, serta profesionalitas yang dimiliki untuk menjalankan kebijakan KJP ini sudah sangat membantu sehingga jalannya kebijakan ini bisa efektif. Antusias yang tinggi serta banyaknya minat untuk

mendapatkan KJP didukung oleh terbukanya pihak sekolah untuk membantu para siswa sehingga siswa tidak merasa malu untuk meminta bantuan.

Baiknya efektifitas yang dimiliki ini, diharapkan dapat ditingkatkan sehingga dengan adanya perbaikan didalam internal sekolah dapat menjadikan contoh terhadap sekolah-sekolah lain yang juga menerima bantuan KJP. Sekolah juga dapat membuat mading atau papan informasi mengenai KJP sehingga siswa tidak perlu repot untuk membuka website atau bertanya kepada guru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Adissasmita, Rahardjo. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munadi, Muhammad. (2011). *Kebijakan Publik dibidang Pendidikan*. Jogjakarta: ar-rruz media.

Nugroho, Ryant. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Elex Media Nomputindo.

Pasalong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Jogjakarta: Aswaja Pressindo.

Setiyono, Budi. (2007). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Kalam Nusantar.

Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang Adminitrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Tangkilisan, Hessel Nogis S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

NON BUKU

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar

Pedoman Bantua Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Dinas Pendidikan Jakarta. (2015).

<http://id.scribd.com/doc/128087470/PEDO MAN-KJP#scribd>. Diunduh pada 5 Februari 2016 pukul 20.00 WIB

Paparan bahan sosialisasi KJP sentralisasi distribusi KJP bulan Maret 2016

Geografis Provinsi DKI Jakarta.
(<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2008/01/Geografis-Jakarta#.V2jRsBI8qSo>)
diunduh pada 8 Februari 2016 pukul 20.30

Informasi Kartu Jakarta Pintar.
<http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/> diunduh pada 16 Februari 2016 pukul 2.12 WIB

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI.
Jakarta.http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Bagan_Struktur_Organisasi_Pemprov_DKI_Jakarta diunduh pada 8 Juni 2016 pukul 13.24 WIB

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Administrasi Jakarta Timur.

http://jakartatimur_siapweb_id/profil-dinas/profil-struktur/ diunduh pada 8 Juni pukul 13.30 WIB

Informasi Umum KJP.

http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6JzcvZWZkZjJIYzliMDg2MDc5Nzk1YzQ0MjYzNmI1NWZiJywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcvNDVhMDVmOWNmOCd9 dinduh pada 10 Juni pukul 14.00 WIB

Kepemimpinan.

(<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/1681/1469>) diunduh pada 5 September 2016 pukul 20.00 WIB